

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Invasi skala penuh Rusia terhadap Ukraina yang terjadi sejak tahun 2022 lalu tidak hanya semata-mata terjadi dalam bentuk perang konvensional. Ketika invasi Rusia mendapat dukungan dari Gereja Ortodoks Rusia (ROC) dan pemimpinnya, Patriark Kirill, invasi ini kemudian menunjukkan nuansa keagamaan, terlebih Ortodoksi di dalamnya. Dukungan ROC terhadap invasi ini kemudian memicu pertentangan dari Gereja Ortodoks Ukraina (OCU) yang menilai jika semangat anti-Kristus bekerja di dalam Putin yang kemudian tidak hanya mengancam Ukraina, tetapi juga turut mengancam dunia. OCU juga menanggapi lebih lanjut tindakan invasi ini yang menilai jika tindakan tersebut merupakan manifestasi doktrin Dunia Rusia yang dianggap sebagai doktrin sesat non-Ortodoks dan menghalangi Ukraina secara khusus untuk menentukan nasibnya sendiri.

Di samping perseteruan di antara ROC dan OCU, konsentrasi pandangan publik juga tertuju pada Gereja Ortodoks Ukraina – Patriarkat Moskow (UOC-MP). Sebagai institusi yang bersubordinasi dengan ROC, persepsi publik kian kritis terhadap Gereja ini lantaran dianggap berperan menyuarakan doktrin Dunia Rusia, menjaga subordinasinya dengan Rusia, serta mendukung invasi Rusia. Hal ini dianggap memunculkan potensi ancaman terhadap keamanan nasionalnya begitu juga dengan nilai independensi spiritualnya. Oleh karena itu, pemerintah Ukraina kemudian memulai skema sekuritisasi terhadap UOC-MP dan secara tidak langsung melakukan sekuritisasi terhadap Doktrin Dunia Rusia.

Proses pertama diawali dengan beberapa pernyataan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh berpengaruh di Ukraina mengenai intensi untuk melakukan proses sekuritisasi seperti narasi Presiden Zelenskyy untuk mendorong independensi spiritual melalui pendekatan legislasi yang juga didukung oleh anggota parlemen Ukraina beserta institusi pemerintahan terkait seperti Sekretariat Keamanan dan Pertahanan Nasional (NSDC) dan Layanan Negara Ukraina untuk Etnopolitik dan Kebebasan Hati Nurani (SEFC) dengan mengujarkan narasi yang serupa. Narasi ini

kemudian mendapat dukungan dari beberapa pihak terutama media Ukraina dan partai politik di Ukraina, meski secara umum cukup dikritik aktor-aktor internasional seperti Gereja-Gereja di luar Ukraina, pemerintah Rusia, dan PBB. Skema sekuritisasi berakhir pada proses tindakan di luar batas wajar seperti dengan menggeledah beberapa situs keagamaan di Ukraina yang terkait dengan UOC-MP, penyelidikan terhadap beberapa pendeta, penghapusan status kewarganegaraan terhadap beberapa pendeta, penangkapan beberapa pendeta, penutupan Gereja UOC-MP di beberapa wilayah di Ukraina seperti di Zhytomyr dan Vinnitsia, serta yang paling terakhir adalah Undang-Undang nomor 3894 yang mengatur 'Tentang Perlindungan Tatanan Konstitusional dalam Lingkup Organisasi Keagamaan'. Undang-undang ini melarang secara khusus aktivitas ROC di Ukraina dan mengatur organisasi keagamaan yang terkait dengan negara agresor termasuk larangan terhadap organisasi keagamaan yang mendukung Dunia Rusia, yang dengan demikian menciptakan peluang untuk membatasi hingga melarang aktivitas UOC-MP di Ukraina secara keseluruhan. Proses ini pun diakui dan diterima oleh para audiens yang dibuktikan dari terpenuhinya tiga indikator *facilitating conditions* yakni menunjukkan *grammar of security*, adanya posisi otoritatif dari para tokoh sekuritisasi yang mendukung penerimaan narasi, serta faktor sejarah yang menciptakan pengondisian untuk menerima narasi keamanan dengan baik. Dengan demikian, penelitian ini dapat menunjukkan alur tindakan delegitimasi yang dianalisis melalui teori sekuritisasi berhasil dilakukan oleh pemerintah Ukraina terlebih pasca invasi Ukraina tahun 2022-2024.

4.2. Saran

Peneliti masih melihat beberapa aspek yang dapat dikembangkan dari penelitian ini. Penelitian ini belum mengeksplorasi sebagian kelompok kecil dari pengikut UOC-MP. Hal ini penting untuk dieksplorasi pada penelitian selanjutnya terlebih ketika pemerintah Ukraina tampak mencoba campur tangan dalam urusan keagamaan dan legitimasinya terhadap Gereja UOC-MP. Di sisi lain hal ini menunjukkan jika pemerintah Ukraina mencoba untuk menjadi pemerintahan yang otoriter, terlebih ketika berurusan dengan agama terkhusus UOC-MP. Pernyataan

ini juga dapat dieksplorasi dalam penelitian selanjutnya untuk menunjukkan bagaimana kondisi invasi belakangan mencoba merubah sikap pemerintah yang cenderung ingin menegaskan legitimasi dan campur tangannya dalam urusan agama sehingga tampak menjadi pemerintahan yang otoriter dalam urusan keagamaan. Di sisi lain, penelitian ini hanya membahas proses delegitimasi dalam kurun waktu tahun 2022-2024 sementara Undang-Undang nomor 3894 masih memberi waktu 9 bulan untuk komunitas keagamaan yang berafiliasi dengan negara agresor untuk memutus hubungannya dengan negara agresor. Penelitian selanjutnya dapat meneliti mengenai segala fenomena yang berkaitan dengan sekuritisasi terkhusus fenomena yang terjadi setelah tahun 2024 atau pengadopsian Undang-Undang No. 3894.